

ABSTRAK

KHI menjelaskan bahwa anak dari hasil hubungan luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Kondisi yang demikian itu, kontradiktif dengan UU perlindungan anak No. 23 tahun 2002 yang mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan oleh kedua orang tuanya bukan ibunya saja. Terjadi bias gender pada konsep hukum Islam (fiqh), anak luar perkawinan (zina) menjadi tanggung jawab ibunya dengan hanya bernasab pada ibunya saja, sehingga secara yuridis gugur kewajiban ayahnya untuk memberikan nafkah, warisan dan menjadi wali anak tersebut. Hubungan nasab anak di luar perkawinan Di dalam pasal 44 UU no 1 tahun 1974 menurut persektif maqasid syari'ah. Dalam UU tersebut bahwa seorang suami meyangkal istrinya atas apa yang dikandung/ di lahirkannya. Sehingga bagaimana hubungan nasab anak tersebut dan bagaimana atas perlindungan menurut perspektif maqasid syari'ah.

Berdasarkan pemaparan di atas, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimanakah hubungan nasab anak di luar perkawinan di dalam pasal 44 UU no 1 tahun 1974 menurut perspektif maqasid syari'ah?

Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dilakukan sebuah penelitian, sedangkan metode yang digunakan oleh penulis yaitu library research. Data primer yang digunakan adalah dokumen-dokumen, kitab-kitab fiqh. Data-data yang terkumpul disusun dan disitematisir dan selanjutnya dianalisis dengan pendekatan ushul fiqh dan metode analisis.

Setelah pembahasan dilakukan, peneliti mempunyai kesimpulan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai nasab dengan ibu kandungnya dan keluarga dari ibunya dan dalam perspektif maqasid syari'ah bertujuan untuk memberikan perlindungan secara aktif-ofensif terhadap jiwa anak meskipun sang anak tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, namun majlis hakim mewajibkan ayahnya secara hukum untuk nafkah sampai anak tersebut dewasa. Dengan tujuan kemaslahatan anak, agar memperoleh kasih sayang, perawatan dan pendidikan dari ayah dan ibunya secara utuh kepada anak tersebut.

ABSTRACT

KHI explains that the child from the outer marriage relationship only has a civil relationship with his mother. Such a condition, contrary to the Child Protection Act no. 23 of 2002 which regulates children's rights to welfare by both parents is not his mother only. There is a gender bias on the concept of Islamic law (fiqh), the offspring of the marriage (adultery) is the responsibility of his mother with only bernasab on her mother alone, so that juridically duty dad his father to give a living, inheritance and become guardian of the child. Relationship of marriage of children outside marriage In article 44 of Law no 1 year 1974 according to maqasid syari'ah perspectives. In the Act that a husband denied his wife for what

was conceived / born. So how the relationship nasab child and how the protection according to the perspective maqasid shari'ah.

Based on the above explanation, the main problem raised in this thesis is how is the relationship of child nasab outside marriage in article 44 of Law no 1 year 1974 according to maqasid syari'ah perspective?

To answer these problems need to be done a research, while the method used by the author of library research. Primary data used are documents, fiqh books. The collected data is arranged and disitematisir and then analyzed with ushul fiqh approach and analysis method.

After the discussion, the researcher concludes that the child born outside the marriage has a nasab with his or her mother and the family of her mother and in the maqasid perspective the shari'ah aims to provide active-offensive protection of the child's soul even though the child has no nasab relationship with his father , but the judge's council obliged his father legally for a living until the child was an adult. With the purpose of the benefit of the child, in order to obtain love saying, care and education from father and mother intact to the child.

